

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Nagari Batipuah Baruah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), Kecamatan Batipuah, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dan yang tak kalah penting adalah pengawasan secara langsung oleh masyarakat Nagari Batipuah Baruah. Keterbukaan dari Pemerintah Nagari terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBNagari akan sangat memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada terhadap pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupten Tanah Datar.
2. Terdapat beberapa permasalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : 1. Kurangnya transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat; 2. Kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak pada aset nagari; 3. Aset strategis berupa Pasar Nagari

tidak dikelola oleh nagari; 4. Alokasi anggaran yang terkesan bagi-bagi
kue sehingga pembanguna fisik yang dilakukan tidak dapat dirasakan
oleh masyarakat.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan adalah kurangnya sumber daya manusia dari badan pengawas, keterbatasan kewenangan yang diberikan dalam melakukan pengawasan, anggaran yang belum mencukupi pelaksanaan pengawasan secara maksimal, banyaknya objek pemeriksaan pengawasan, luas wilayah dan jarak tempuh dalam melakukan pengawasan serta masih minimnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi dan sumberdaya yang ada agar pengawasan pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupten Tanah Datar dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Nagari Batipuah Baruah maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari harus ditingkatkan dengan menambah kualitas dan kuantitas dari sumberdaya manusia yang dirasa kurang oleh masing-masing badan pengawas dan masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan.
2. Meningkatkan kualitas manajemen pengawasan nagari terutama dalam tahap pelaksanaan APBNagari termasuk dalam proses perencanaan dan pelaporan yang harus berdasarkan kepada asas-asas dan aturan hukum yang berlaku.
3. Pengawasan harus dilakukan dengan koordinasi dengan masyarakat sekaligus memberikan pencerdasan kepada masyarakat akan pentingnya peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan